

## POLISI DAN DISTORSI DALAM PENEGAKAN HUKUM

Oleh :  
Nur Yahya

Ketidakmandirian secara struktural menyebabkan profesionalisme Polri tidak berkembang yang pada gilirannya dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya terjadi banyak distorsi.

### A. Pengantar

Meskipun belum ada data akurat tentang motivasi seseorang untuk menjadi anggota Polri, baik melalui rekrutmen langsung maupun melalui pendidikan Taruna Akpol.

Tapi yang jelas, tuntutan untuk mendapatkan lapangan kerja dan kalau dapat "merubah nasib" menjadi salah satu faktor pendorong utamanya. Dalam dunia yang kian materialistis seperti sekarang, susah rasanya untuk tidak peduli terhadap pengaruh-pengaruh yang berbau kebendaan.

Logika ekonomi dewasa ini mempengaruhi hampir setiap pikiran dan tindakan kita, termasuk juga anggota Polri. Ironisnya, penghasilan resmi yang diperoleh baik sebagai negeri sipil maupun sebagai anggota ABRI, tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan dasar sekalipun.

Kondisi semacam ini boleh jadi akan mengganggu etos profesionalisme mereka untuk menjadi pejuang yang mengabdikan kepada negara dan masyarakat.

Secara ideal memang sering dikatakan pejuang dulu baru profesional bukannya dibalik.

Tetapi dalam kenyataannya tidak setiap orang dapat melakukannya tidak setiap orang dapat melakukannya, terutama mereka yang secara ekonomi lemah, dan jauh dari pusat kekuasaan. Padahal yang namanya kebutuhan hidup layak.

Sementara jalan resmi menuju itu relatif tertutup akibatnya berbagai "improvisasi" dilakukan oleh anggota Polri di lapangan. Maka terjadilah "distorsi" terhadap ideologi penegakan hukum yang bekerja berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum untuk menjunjung nilai-nilai dan keadilan.

### B. Distorsi Dalam Penegakan Hukum

Distorsi ideologi penegakan hukum tersebut sering kali secara resmi diberikan secara resmi diberikan cap sebagai ulah "oknum" sebagai